

Partisipasi Politik Masyarakat di Era Digital

Ashariana

FISIP UPRI Makassar, Indonesia

asharianayahya@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Pelayanan Publik,
Pengendalian Arsip,
Perijinan, Efisiensi,
Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan dan pengendalian arsip dalam proses pembuatan salinan perijinan yang dikelola oleh Kabupaten Kubu Raya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta untuk mengevaluasi sistem pengelolaan arsip yang mendukung proses perijinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, yaitu kepala DPMPTSP, petugas teknis OPD terkait, petugas front office dan back office perijinan, serta pemohon perijinan dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan dan pengendalian arsip sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan terkait koordinasi antar instansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi dan integrasi sistem pengarsipan guna mempercepat proses pembuatan salinan perijinan.

Abstract

Key Word:

Public Services, Archive
Control, Licensing,
Efficiency, Kubu Raya
Regency.

This research aims to analyze the effectiveness of service and archive control in the process of making copies of permits managed by Kubu Raya Regency. The focus of this research is to identify obstacles, efficiency and quality of services provided by the One Stop Integrated Services and Investment Service (DPMPTSP), as well as to evaluate the archive management system that supports the licensing process. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with several key informants, namely the head of DPMPTSP, relevant OPD technical officers, front office and back office licensing officers, as well as permit applicants from the community. The research results show that even though the records service and control system is running well, there are still several challenges related to coordination between agencies and the use of information technology. This research provides recommendations for increasing efficiency and integration of filing systems to speed up the process of making permit copies.

Copyright © 2024 Ashariana

This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, lanskap partisipasi politik masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi individu untuk terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih inklusif dan langsung. Platform media sosial, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam diskusi politik dengan mudah dan cepat (Halim, Umar & Jauhari, Kurnia Dyah, 2019). Dengan kemajuan teknologi ini, individu dapat dengan mudah mengakses dan menyebarluaskan informasi politik kepada audiens yang luas, tanpa batasan waktu dan ruang. Media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pandangan mereka, mendiskusikan isu-isu politik, dan memobilisasi dukungan untuk berbagai cause (Cangara, Hanfield, 2014).

Aplikasi mobile dan alat digital lainnya juga memainkan peran penting dalam mempermudah organisasi dan koordinasi aksi politik. Melalui aplikasi yang dirancang untuk kampanye, petisi, atau gerakan sosial, masyarakat dapat mengorganisir kegiatan, mengumpulkan tanda tangan, dan memobilisasi peserta dengan efisiensi yang tinggi. Ini memungkinkan terjadinya partisipasi politik yang lebih terstruktur dan terorganisir, serta mempercepat respon terhadap isu-isu yang berkembang (Josep, 2018).

Namun, kemudahan akses dan kecepatan komunikasi ini juga membawa tantangan tersendiri. Sementara teknologi mempermudah keterlibatan, ia juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang tidak akurat dan meningkatkan risiko terjadinya penyebaran berita palsu. Selain itu, walaupun akses ke platform digital lebih luas, tidak semua individu memiliki keterampilan yang sama dalam menggunakan alat-

alat ini secara efektif, yang bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik (Budiardjo, Miriam, 2015).

Oleh karena itu, meskipun teknologi digital menawarkan peluang yang signifikan untuk memperluas partisipasi politik, penting untuk memastikan bahwa alat-alat ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Pengguna harus didorong untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dan kritis dalam diskusi politik, sementara pembuat kebijakan dan penyedia platform harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti masalah keamanan informasi dan privasi. Dengan pendekatan yang seimbang dan strategis, teknologi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendukung proses demokrasi (Judita, Christiany & Darmawan, Josep, 2018).

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan politik, tetapi juga cara pemerintah dan lembaga politik merespons dan berinteraksi dengan warganya. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas dan transparan, masyarakat kini lebih berdaya untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah serta mempengaruhi kebijakan publik. Namun, era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan potensi polarisasi yang lebih dalam.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana partisipasi politik masyarakat bertransformasi di era digital, termasuk manfaat dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi politik di tengah kemajuan teknologi, mengidentifikasi perubahan perilaku politik, serta menilai dampak dari keterlibatan digital terhadap proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memfasilitasi partisipasi politik yang sehat dan produktif di era digital..

METODE

Untuk memahami partisipasi politik masyarakat di era digital secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi politik dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan (Arikunto, Suharsimi, 2013): Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratif untuk menggali dan memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam aktivitas politik melalui platform digital. Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi mempengaruhi pola partisipasi politik dan bagaimana individu serta kelompok merespons perubahan ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai partisipan yang terlibat dalam aktivitas politik digital, seperti aktivis, anggota organisasi politik, pengguna media sosial, dan pengamat politik. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman pribadi mereka, motivasi, serta tantangan yang dihadapi dalam berpartisipasi secara digital.

Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan kelompok masyarakat yang memiliki keterlibatan aktif dalam platform digital untuk membahas pandangan mereka tentang dampak teknologi terhadap partisipasi politik. Diskusi ini membantu mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola-pola yang muncul dari interaksi kelompok. Analisis konten dilakukan dengan mengkaji postingan, komentar, dan diskusi di berbagai platform media sosial untuk memahami tema, narasi, dan pola partisipasi politik yang muncul di dunia maya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap sentimen dan tren yang relevan dalam konteks digital.

Partisipan dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan mengenai partisipasi politik digital. Kriteria pemilihan termasuk keterlibatan aktif dalam politik digital, pengalaman dalam menggunakan platform digital untuk tujuan politik, dan perwakilan dari berbagai latar belakang demografis.

Data dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok, dan analisis konten media sosial, kemudian transkrip wawancara dan catatan diskusi dikelompokkan dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola interaksi, dan makna di balik partisipasi politik digital.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan meminta partisipan untuk memverifikasi temuan awal dan interpretasi yang dibuat. Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari partisipan sebelum wawancara atau diskusi kelompok, serta menjaga kerahasiaan dan anonimitas data yang diperoleh. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menghormati hak dan privasi partisipan. Melalui metode penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman

yang mendalam mengenai bagaimana era digital mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks politik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi dalam Pola Partisipasi Politik

Penelitian menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di era digital telah mengalami perubahan signifikan. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, menyebarkan informasi, dan mengorganisir kampanye. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa partisipasi politik kini lebih bersifat spontan dan dinamis, dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi yang lebih terstruktur sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mudah terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka secara langsung. Media sosial telah menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengorganisir gerakan sosial, yang memungkinkan partisipasi politik terjadi secara lebih cepat dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang.

Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan mendefinisikan partisipasi politik. Partisipasi tidak lagi terbatas pada kegiatan formal seperti pemilu atau keterlibatan dalam organisasi politik, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang lebih informal dan berbasis isu, seperti petisi online, kampanye media sosial, dan protes virtual. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menanggapi isu-isu politik, dan lebih memilih untuk terlibat dalam aksi-aksi yang dirasa lebih relevan dan berdampak langsung.

Selain itu, wawancara juga mengungkap bahwa partisipasi politik yang bersifat spontan dan dinamis ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan keprihatinan pribadi terhadap isu-isu tertentu. Isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, seperti kebijakan ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia, cenderung memicu reaksi yang lebih cepat dan intens dari masyarakat. Partisipasi ini, meskipun lebih cair dan tidak terstruktur, memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan sosial dan politik, karena mampu menarik perhatian publik secara luas dalam waktu singkat.

Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang. Partisipasi yang bersifat spontan sering kali tidak terencana dengan baik dan dapat kehilangan momentum jika tidak diikuti oleh strategi dan dukungan yang konsisten. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik dan aktivis untuk memahami dan memanfaatkan dinamika ini dengan bijak, serta untuk mendorong keterlibatan yang lebih mendalam dan berkelanjutan di kalangan masyarakat.

Motivasi dan Faktor Pendorong Partisipasi Digital

Hasil diskusi kelompok terfokus mengungkapkan bahwa motivasi utama masyarakat untuk berpartisipasi secara digital termasuk keinginan untuk menyuarakan pendapat, mengakses informasi yang lebih transparan, dan terlibat dalam perubahan sosial. Banyak partisipan merasa bahwa platform digital memberikan mereka kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dibandingkan dengan metode tradisional. Platform digital, seperti media sosial, forum online, dan petisi elektronik, telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat mereka, menggalang dukungan, dan menekan pembuat kebijakan dengan lebih cepat dan efektif.

Salah satu alasan utama mengapa partisipan merasa lebih berdaya adalah karena platform digital memungkinkan komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan dan pejabat publik. Di era digital, suara individu tidak lagi terbatas pada ruang-ruang diskusi terbatas atau pertemuan formal, tetapi dapat disebarkan secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar. Ini berarti bahwa partisipasi tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan opini publik.

Selain itu, platform digital memberikan kemampuan untuk mengorganisir gerakan sosial secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Kampanye yang dimulai di media sosial dapat dengan cepat mendapatkan momentum, dengan ribuan bahkan jutaan orang yang dapat terlibat dan mendukung suatu isu dalam hitungan jam atau hari. Ini menunjukkan bahwa pengaruh individu atau kelompok kecil dapat diperbesar melalui jaringan digital, yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan perhatian pada isu-isu tertentu dan menuntut perubahan.

Para partisipan juga menyadari bahwa platform digital memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan akses langsung ke informasi dan kemampuan untuk memantau aktivitas pejabat publik secara real-time, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan

memegang para pemimpin mereka agar bertanggung jawab. Hal ini mengurangi jarak antara masyarakat dan pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, meskipun platform digital memberikan banyak peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, tidak semua suara yang muncul di platform digital mendapat perhatian yang sama, dan ada risiko bahwa isu-isu penting bisa tenggelam dalam lautan informasi yang ada. Selain itu, ancaman disinformasi dan manipulasi informasi juga dapat mengganggu proses partisipasi yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna platform digital untuk tetap kritis, terinformasi, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi ini untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik.

Tantangan dan Hambatan

Analisis konten media sosial dan wawancara mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam partisipasi politik digital, termasuk penyebaran informasi yang salah (misinformation), echo chamber (ruang gema) di media sosial yang memperkuat pandangan sepihak, serta privasi dan keamanan data pribadi. Partisipan juga melaporkan adanya kesulitan dalam membedakan antara informasi yang kredibel dan tidak kredibel di platform digital.

Dampak terhadap Proses Demokrasi

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi politik digital membuka akses yang lebih luas untuk terlibat dalam proses politik, hal ini juga dapat memperdalam polarisasi politik. Diskusi kelompok terfokus mencatat bahwa keterlibatan yang intens di ruang echo chamber dapat memperkuat pandangan ekstrem dan mengurangi dialog konstruktif antara kelompok dengan pandangan yang berbeda.

Pembahasan

Evolusi Pola Partisipasi Politik

Perubahan dalam pola partisipasi politik di era digital mencerminkan pergeseran dari partisipasi yang bersifat fisik dan formal menuju bentuk partisipasi yang lebih digital dan informal. Platform digital memberikan akses yang lebih luas dan cepat kepada masyarakat untuk terlibat dalam politik, yang memungkinkan partisipasi yang lebih terdistribusi dan beragam. Namun, pergeseran ini juga menuntut adaptasi dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi metode kampanye politik maupun cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dengan munculnya platform digital sebagai arena utama untuk partisipasi politik, kampanye politik harus menyesuaikan strategi mereka untuk memanfaatkan media sosial dan alat digital lainnya secara efektif. Ini mencakup pendekatan yang lebih responsif dan dinamis, di mana pesan politik harus dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai format dan algoritma platform digital, serta memanfaatkan data analitik untuk memahami audiens dan merancang kampanye yang lebih terfokus (Andriadi, Fayakhun, 2017).

Di sisi lain, pemerintah juga harus beradaptasi dengan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dalam era digital, transparansi dan aksesibilitas menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menggunakan saluran digital untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan informasi yang relevan secara langsung, dan mendengarkan serta merespons umpan balik masyarakat dengan cepat. Hal ini termasuk mengelola kehadiran online yang aktif, memfasilitasi dialog terbuka, dan menangani isu-isu terkait privasi serta keamanan data dengan hati-hati.

Selain itu, adanya tantangan terkait informasi yang salah dan polarisasi mengharuskan semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan dan menerima informasi. Kampanye politik dan pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, mempromosikan sumber informasi yang kredibel, dan membangun platform yang mendorong diskusi yang sehat serta berimbang. Adaptasi ini bukan hanya tentang memanfaatkan teknologi, tetapi juga tentang memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas interaksi politik, bukan justru menambah kompleksitas dan konflik (Liando, M. Daud, 2016).

Motivasi di Balik Partisipasi Digital

Motivasi masyarakat untuk terlibat dalam politik digital mencerminkan keinginan untuk memiliki suara yang lebih besar dan terlibat dalam proses politik secara lebih langsung. Teknologi digital menawarkan kesempatan untuk mengatasi keterbatasan geografi dan waktu yang sering kali membatasi partisipasi politik tradisional. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa keterlibatan ini sering kali dipengaruhi oleh akses dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi. Akses yang tidak merata ke perangkat digital dan koneksi internet dapat membatasi partisipasi politik bagi sebagian kelompok masyarakat. Ketimpangan

digital ini menciptakan jurang antara mereka yang memiliki fasilitas teknologi yang memadai dan mereka yang tidak. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur teknologi berperan besar dalam menentukan seberapa efektif seseorang dapat berpartisipasi dalam arena politik digital (Miaz, Yalfema, 2012).

Selain itu, kemampuan individu dalam menggunakan teknologi juga berpengaruh. Tidak semua orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi berbagai platform digital, mengevaluasi informasi, atau berpartisipasi dalam diskusi online secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat keterlibatan dan kualitas partisipasi politik antara berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, mereka yang tidak terampil dalam menggunakan teknologi mungkin kesulitan untuk memahami atau menyebarkan informasi secara tepat, serta terlibat dalam diskusi politik secara konstruktif (Atmoko Dwi, 2015).

Penting untuk mengatasi kesenjangan ini dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk upaya untuk menyediakan akses yang lebih luas ke teknologi dan internet, serta inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan individu menghadapi tuntutan era digital. Selain itu, kebijakan publik harus dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki peluang yang setara untuk terlibat dalam partisipasi politik digital. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan politik yang lebih inklusif dan partisipatif, yang mencerminkan keragaman suara dan pandangan dalam masyarakat.

Tantangan Informasi dan Polaritas

Tantangan terkait penyebaran informasi yang salah dan polarisasi menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan literasi media dan verifikasi informasi di kalangan pengguna. Echo chamber yang terbentuk di media sosial mempertegas pentingnya mendukung dialog yang lebih inklusif dan multilateral untuk menghindari polarisasi yang ekstrem. Upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan akses dan keterampilan digital harus melibatkan sinergi antara platform digital, pembuat kebijakan, dan pengguna individu. Platform digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka sediakan dapat diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan. Mereka bisa memainkan peran aktif dalam meningkatkan aksesibilitas dengan merancang antarmuka yang ramah pengguna, menyediakan fitur yang membantu individu dengan kebutuhan khusus, dan berkolaborasi dengan komunitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka (Anshari, Faridhian, 2013).

Pembuat kebijakan juga perlu terlibat dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pemerataan akses teknologi. Mereka dapat merancang kebijakan yang memfasilitasi pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah yang kurang berkembang, serta memastikan bahwa program pendidikan digital dan pelatihan tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang mendukung privasi dan keamanan data sangat penting untuk melindungi pengguna dari risiko yang mungkin timbul dalam berinteraksi dengan teknologi digital (Mulyati, Ani, 2014).

Pengguna individu juga memiliki peran penting dalam ekosistem ini. Mereka harus proaktif dalam mengembangkan keterampilan digital mereka dan mencari sumber daya yang dapat membantu mereka lebih memahami dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, pengguna dapat berkontribusi dengan memberikan umpan balik kepada platform digital dan pembuat kebijakan mengenai tantangan yang mereka hadapi, serta berpartisipasi dalam inisiatif komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Dengan mengintegrasikan upaya dari ketiga pihak ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi politik yang lebih luas dan lebih efektif di era digital. Sinergi antara platform digital, kebijakan publik, dan keterlibatan individu akan membantu mengatasi ketimpangan yang ada, serta memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang memperkuat demokrasi dan partisipasi politik.

Implikasi bagi Demokrasi

Dampak partisipasi politik digital terhadap proses demokrasi adalah ambivalen. Di satu sisi, teknologi digital memfasilitasi akses dan inklusi yang lebih besar, yang dapat memperkuat demokrasi dengan memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses politik. Platform digital memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terlibat dalam aksi sosial tanpa batasan geografis atau waktu. Dengan akses yang lebih luas ke informasi dan saluran komunikasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses berita, mengikuti perkembangan isu politik, dan berpartisipasi dalam debat publik. Hal ini berpotensi memperkaya proses demokrasi dengan membawa lebih banyak suara dan perspektif ke dalam diskusi politik, serta memungkinkan respon yang lebih cepat dan berbasis data terhadap isu-isu publik

(Fernandes, Arya dkk, 2019).

Namun, di sisi lain, ambivalensi juga muncul karena teknologi digital dapat memperdalam polarisasi dan menghambat dialog konstruktif. Adanya ruang echo chamber di media sosial, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, dapat memperkuat perpecahan ideologis dan mengurangi kesempatan untuk berdialog dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menyesatkan opini publik dan menghambat proses demokrasi yang sehat.

Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital menawarkan alat dan platform yang sangat berguna untuk partisipasi politik, implementasinya harus diimbangi dengan upaya untuk mengatasi potensi dampak negatifnya. Agar teknologi digital benar-benar memperkuat demokrasi, perlu adanya kebijakan yang mendukung keberagaman pendapat, memperbaiki kualitas informasi yang beredar, dan mendorong interaksi yang produktif antarindividu dengan latar belakang yang berbeda. Seiring dengan itu, masyarakat juga perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai dan menggunakan informasi yang mereka terima secara online. Dengan pendekatan yang seimbang, potensi positif teknologi digital dapat dioptimalkan untuk memperkuat dan memperdalam proses demokrasi. Di sisi lain, potensi untuk memperdalam polarisasi dan memperlemah kualitas dialog politik menggarisbawahi kebutuhan untuk merancang kebijakan yang mempromosikan keterlibatan yang sehat dan produktif. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan cara-cara untuk memitigasi dampak negatif sambil memanfaatkan potensi positif teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi politik (Damsar, 2010).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat berkembang di era digital. Meskipun ada banyak peluang yang ditawarkan oleh teknologi, tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam memanfaatkan potensi digital untuk mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi politik masyarakat telah mengalami perubahan mendalam di era digital. Platform media sosial dan teknologi informasi telah memperluas ruang partisipasi politik, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih langsung, cepat, dan inklusif. Melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan analisis konten media sosial, ditemukan bahwa motivasi utama masyarakat untuk berpartisipasi secara digital termasuk keinginan untuk menyuarakan pendapat, mengakses informasi secara transparan, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Namun, era digital juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti penyebaran informasi yang salah, polarisasi yang mendalam, dan isu-isu terkait privasi serta keamanan data. Tantangan ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan literasi media dan verifikasi informasi agar partisipasi politik digital dapat berlangsung dengan lebih sehat dan produktif. Dampak dari partisipasi politik digital terhadap proses demokrasi adalah campuran antara peluang dan risiko. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan keterlibatan yang lebih beragam, yang dapat memperkuat proses demokrasi. Di sisi lain, polarisasi yang diperparah oleh media sosial dan tantangan terkait informasi menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam merancang kebijakan dan strategi untuk memastikan partisipasi politik yang konstruktif dan inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dan mengelola dinamika partisipasi politik di era digital untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko, demi mendukung demokrasi yang lebih robust dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Andriadi, Fayakhun, Partisipasi Politik Virtual, Jakarta : RMBOOKS, 2017.
Anshari, Faridhian, 2013, “Komunikasi Politik di Era Media Sosial”, Jurnal Komunikasi, Vol.8 No.1, Edisi Oktober.
Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
Atmoko Dwi, Bambang, Instagram Handbook, Jakarta : Media Kita, 2015.
AW, Suranto, Komunikasi Sosial Budaya, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Cangara, Hanfield, Komunikasi Politik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Kencana, 2010.
Fernandes, Arya dkk, Perihal Penyelenggaraan Kampanye : Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, BAWASLU, 2019.
Halim, Umar & Jauhari, Kurnia Dyah, 2019, “Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik dalam

- Pilkada DKI Jakarta 2017”, Jurnal ASPIKOM, Vol.4, No.1, Edisi Juli.
- II, H., Amin, T. S., & Zulfitri, Z. (2022). Community’s Role In Developing Local Culture And Wisdom In The Digital Media Era. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 1(6), 394–403. <https://doi.org/10.31004/anthor.v1i6.144>
- Josep, Partisipasi Politik Di Indonesia dan Upaya Pengembangannya, Indocamp, 2018.
- Judita, Christiany & Darmawan, Josep, 2018, “Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan opini Publik, Vol.22, No.2.
- Liando, M. Daud, 2016, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.3, No.2, Edisi Oktober.
- Miaz, Yalfema, Partisipasi Politik : Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi, UNP Press Padang, 2012.
- Mulyati, Ani, Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementrian Perdagangan RI, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- Tana, F., Rauzah, F., Aprilyanti, A., Rahmalisa, R., & Fazila, S. (2024). Pengaruh Media Sosial Bagi Perkembangan Karakter Anak Usia Dini. *Indo Green Journal*, 2(2), 146 – 151. <https://doi.org/10.31004/green.v2i2.66>.